



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTIFIKASI

Tempat Pemungutan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2019



jatim.bawaslu.go.id



Bawaslu Jatim



[@bawaslujatil](https://www.instagram.com/bawaslujatil)



[@bawaslujatil](https://twitter.com/bawaslujatil)



[Bawaslu Jatim](https://www.youtube.com/BawasluJatim)

IDENTIFIKASI TPS RAWAN



IDENTIFIKASI TPS RAWAN

IDENTIFIKASI TPS RAWAN

Copyright ©, 2019

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Kota Tua. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tim Penyusunan

Pengarah	Moh. Amin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab	Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penulis	Aang Kunaifi Maulana Hasun
Pembaca Akhir	Nur Elya Anggraini Eka Rahmawati
Editor	Muhammad Zamroni
Desain dan Layout	Ilham Bagus Priminanda
Administrasi	Ghaniy Hakim Larasadi Fitrya Nadya Sabyla Fathony Air Lambang M. Syuhada' Aditya Pramono

Penerbit:
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

ISBN 978-623-90290-5-0



9 786239 029050

Kata Pengantar

Bismillahirrahmannirahim

Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat

TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang berdampak pada hilangnya hak Pilih, mempengaruhi pilihan Pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini Pengawas Pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Pengawas Pemilu dapat melibatkan semua stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan.

Hasil pemetaan ini memotret hasil beberapa indikator diantaranya TPS terdapat Pemilih pindahan (DPTb), TPS terdapat Pemilih baru (DPK), TPS dekat rumah sakit, TPS dekat Perguruan Tinggi, TPS dekat lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama), TPS terdapat praktik pemberian uang atau larangan pada masa kampanye, TPS terdapat praktik menghina/menghasut diantara Pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan, TPS Petugas KPPS

berkampanye untuk Peserta Pemilu dan TPS berada di dekat Posko/rumah tim kampanye Peserta Pemilu.

Pemetaan TPS rawan ini bertujuan, sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara, menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.

Buku ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu masukan ataupun kritikan yang konstruktif sangat diharapkan, agar tulisan laporan ini menjadi lebih sempurna. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah referensi tentang kajian Pemilu dan demokrasi di Provinsi Jawa Timur. ***Syai Un Lilahi Lahumul Fatihah. Aamiin. Selamat membaca.***

Surabaya, 15 Oktober 2019

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Aang Kunaifi, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Dasar Hukum Pelaksanaan	3
Hasil Identifikasi TPS Rawan Provinsi Jawa Timur	3
1. TPS Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Pindah Pilih	3
2. TPS Terdapat Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih Baru Tidak Terdaftar di DPT	4
3. TPS Lokasinya Dekat Rumah Sakit	5
4. TPS Lokasinya Dekat Perguruan Tinggi	7
5. TPS Lokasinya Dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama)	8
6. TPS Terdapat Praktik Pemberian Uang/Barang Pada Masa Kampanye	9
7. TPS Terdapat Praktik Menghina/Menghasut diantara Pemilih dengan Menggunakan Isu SARA di sekitar TPS	10
8. TPS Petugas KPPSnya diketahui Berkampanye untuk Peserta Pemilu	11
9. TPS Lokasinya Berdekatan dengan Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu	12
10. TPS Terdapat Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara Mengalami Kerusakan	13
LAMPIRAN	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 TPS terdapat Pemilih Pindah Pilih (DPTb)	4
Grafik 2 TPS ada Pemilih Baru (DPK)	5
Grafik 3 TPS Lokasinya Dekat Rumah Sakit 6	
Grafik 4 TPS Lokasinya Dekat Perguruan Tinggi/ Universitas	7
Grafik 5 TPS Lokasinya Dekat Pesantren/Asrama	8
Grafik 6 Lokasi TPS Waktu Kampanye ada Pemberian Uang/Barang	9
Grafik 7 TPS Waktu Kampanye terdapat isu SARA	10
Grafik 8 TPS Netralitas Petugas KKPS	11
Grafik 9 TPS Lokasinya berdekatan dengan Posko Pemenangan	13
Grafik 10 TPS Logistiknya Terdapat Kerusakan	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Variabel dan Indikator dalam Mengidentifikasi TPS Rawan	2
---	---

Pendahuluan

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih.

Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Pengawas pemilu dapat melibatkan semua stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan.

Tabel 1 Variabel dan Indikator dalam Mengidentifikasi TPS Rawan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih	1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS 2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS 3. TPS dekat rumah sakit 4. TPS dekat perguruan tinggi 5. TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/ asrama)
2	Kampanye	6. Terdapat praktik pemberian uang atau larangan pada masa kampanye di TPS 7. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara Pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS
3	Netralitas	8. Petugas KPPS berkampanye untuk Peserta Pemilu
4	Pemungutan Suara	9. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu

Bawaslu mengidentifikasi TPS rawan bertujuan untuk:

1. Pemetaan kerawanan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.
2. Menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan identifikasi ini berdasarkan:

1. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum; dan
3. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0674/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2019, tanggal 1 April 2019 Tentang Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan TPS Rawan Pemilu Tahun 2019.

Hasil Identifikasi TPS Rawan Provinsi Jawa Timur

1. TPS Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih Pindah Pilih

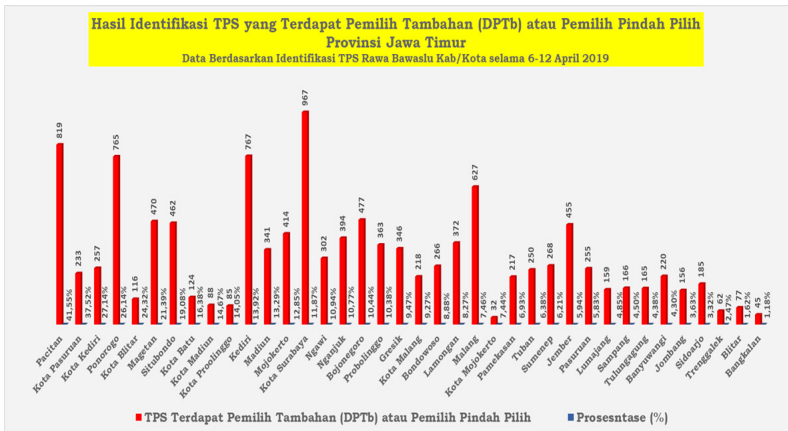
Hasil Identifikasi terhadap indikator ini, sejumlah 11.985 TPS terdapat Pemilih Pindah Pilih dari TPS domisilinya ke TPS lain, atau sekitar 9.22% dari jumlah TPS di Jawa Timur 130.010 TPS. Pemilih Tambahan ini dikarenakan Pemilih tersebut sedang menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, Pindah domisili, TerKelompok Kerjapa bencana dan Bekerja di luar domisilinya. Sehingga Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asal dan menggunakan hak pilihnya

IDENTIFIKASI TPS RAWAN

ketempat tujuan pindah memilih.

Pemilih ini konsekuensinya tidak mendapatkan penuh surat suaranya (5 surat suara), dikarenakan beda daerah pemilihan dan/atau pindah provinsi lain. Pengawas Pemilu memastikan Pemilih ini mendapatkan suara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sebagai langkah pencegahan Pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS 3 dan 4 untuk memberitahukan kepada Pengawas TPS, jika terdapat Pemilih DPTb atau Pemilih pindah pilih.

Grafik 1 TPS terdapat Pemilih Pindah Pilih (DPTb)



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

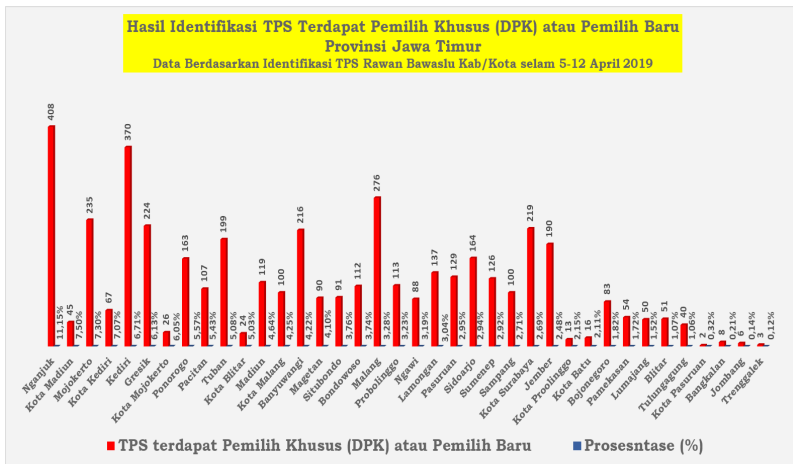
2. TPS Terdapat Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih Baru Tidak Terdaftar di DPT

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 4.464 TPS terdapat Pemilih khusus (DPK) atau Pemilih baru yang memenuhi syarat tidak masuk DPT atau sekitar 3.43% dari 130.010 TPS di

Jawa Timur. Pemilih ini memenuhi syarat sebagai Pemilih, pada waktu penetapan DPT Pemilih ini tidak masuk daftar sebagai Pemilih.

Pengawas Pemilu memastikan penggunaan hak pilihnya mulai pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB, ini dilakukan dengan dengan tetap berada dilokasi TPS dan memastikan Pemilih tersebut dilayani hak pilihnya, apabila memiliki KTP elektronik, Surat Keterangan dari Dispenduk Capil atau instansi lan yang sejenis yang memiliki kewenangan. potensi kerawan pada ketersediaan surat suara pada Pemilih khusus (DPK), waktu penggunaan hak pilihnya dan tidak adanya dokumen kependudukan/identitas yang sejenis.

Grafik 2 TPS ada Pemilih Baru (DPK)



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

3. TPS Lokasinya Dekat Rumah Sakit

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 675 TPS lokasinya dekat dengan Rumah Sakit atau sekitar 0.52% dari 130.010 TPS di Jawa Timur. Pemilih ini memenuhi syarat karena kondisinya

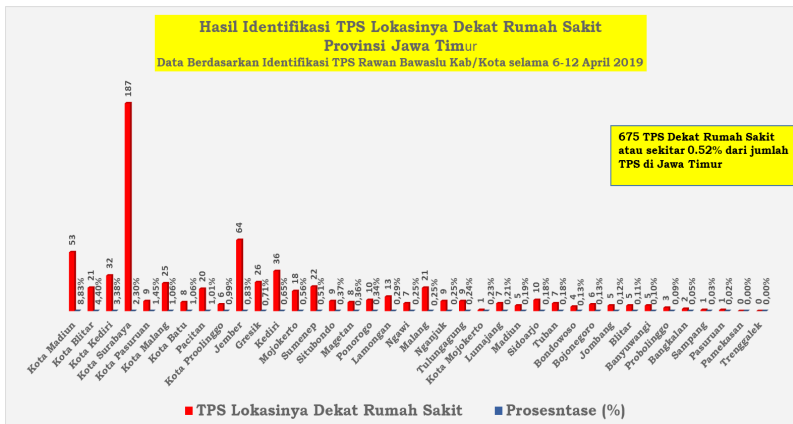
IDENTIFIKASI TPS RAWAN

sakit pada tanggal 17 April 2018, tidak bisa menggunakan di TPS dimana dia tinggal dan terdaftar atau pada keluarganya sudah mendaftarkan sebagai Pemilih tambahan (DPTb).

Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang sedang sakit di rawat di rumah sakit masuk dalam daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan terhadap Pemilih khusus (DPK) mempunyai identitas diri, serta memastikan pada saat Petugas KPPS mendatangi ke rumah sakit menyertakan Pengawas TPS dan Saksi. Hal ini dilakukan dengan cara Pengawas TPS melakukan koordinasi dengan Ketua KPPS terhadap Pemilih atau keluarganya yang sedang di rumah sakit, dikarenakan berdampak pada kebutuhan surat suara di TPS.

Potensi kerawanan pada ketersediaan surat suara, penggunaan surat suara Pemilih atau keluarganya yang berada di rumah sakit dan pelayanan bagi Pemilih di rumah sakit oleh KPPS dengan membawa tempat penyimpanan surat suara untuk menyimpan surat suara yang dicoblos.

Grafik 3 TPS Lokasinya Dekat Rumah Sakit



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

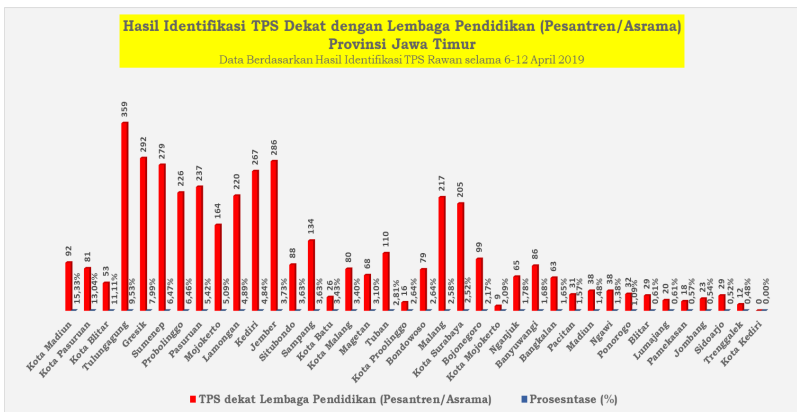
5. TPS Lokasinya Dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama)

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 4.171 TPS lokasinya dekat dengan lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama atau 3.21% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur. meskipun sudah ada TPS berbasis DPTb di Pondok Pesantren, namun Pemilih ini rentan untuk dimobilisasi, sehingga mempengaruhi pilihan pemilih.

Pengawas TPS memastikan ketersediaan surat suara dan Pemilih yang tercatat sebagai Pemilih DPTb dapat surat suara sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh Pengawas TPS dengan berkoordinasi dengan Ketua KPSS dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS Pemilih Tambahan (DPTb) pada waktu datang ke TPS.

Potensi kerawan pada indikator ini adalah ketersediaan surat suara, penggunaan surat suara bagi para santi sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dan mobilisasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Grafik 5 TPS Lokasinya Dekat Pesantren/Asrama



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

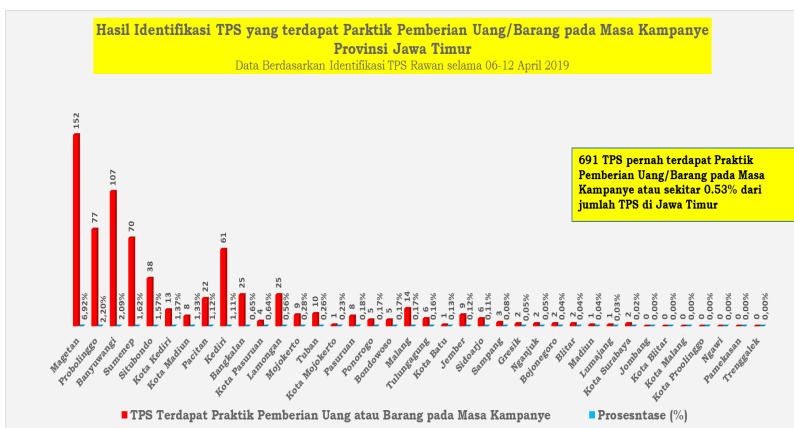
6. TPS Terdapat Praktik Pemberian Uang/Barang Pada Masa Kampanye

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 691 TPS diketahui pada waktu Kampanye terdapat pemberian Uang/Barang oleh Peserta Pemilu atau Pelaksan Kampanye kepada Peserta Kampanye, sekitar 0.53% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur.

Pengawas Pemilu memastikan pada saat sebelum dan pada waktu pemungutan dan penghitungan suara, tidak terulang kembali pemberian uang/barang oleh Peserta Pemilu kepada Pemilih, sehingga mempengaruhi pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPPS, Kepolisian, Linmas dan Tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya politik uang pada masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara.

Potensi kerawanan pada pengulangan kejadian yang sama, yaitu praktik pemberian uang/barang kepada Pemilih, sehingga mempengaruhi pilihan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Grafik 6 Lokasi TPS Waktu Kampanye ada Pemberian Uang/Barang



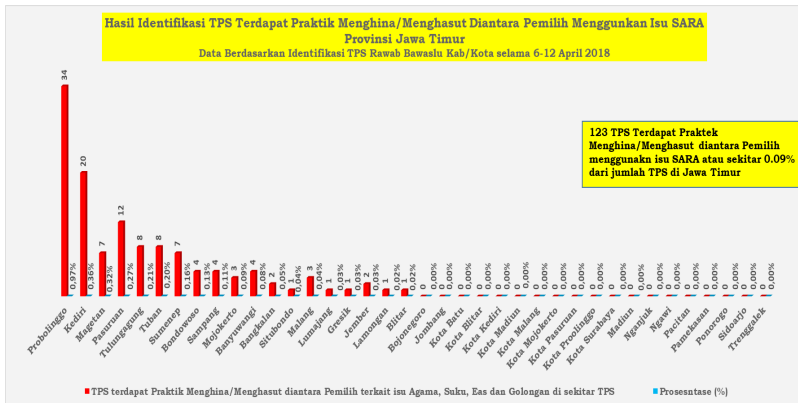
Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

7. TPS Terdapat Praktik Menghina/Menghasut diantara Pemilih dengan Menggunakan Isu SARA di sekitar TPS

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 123 TPS ditemukan terdapat Pemilih menggunakan isu-isu SARA dalam Kampanye Pemilu 2019 atau sekitar 0.09% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur.

Isu-isu seperti ini tentunya dapat mengurangi nilai demokratis dalam Pemilu, Pengawas Pemilu melaporkan pada masa tenang, jika terdapat Pemilih yang menggunakan isu SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih. hal ini dilakukan dengan Pengawas TPS berkoordinasi dengan Kepolisian, KPPS, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat untuk mencegah atau meminimalisir potensi penggunaan isu SARA pada saat masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara.

Grafik 7 TPS Waktu Kampanye terdapat isu SARA



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

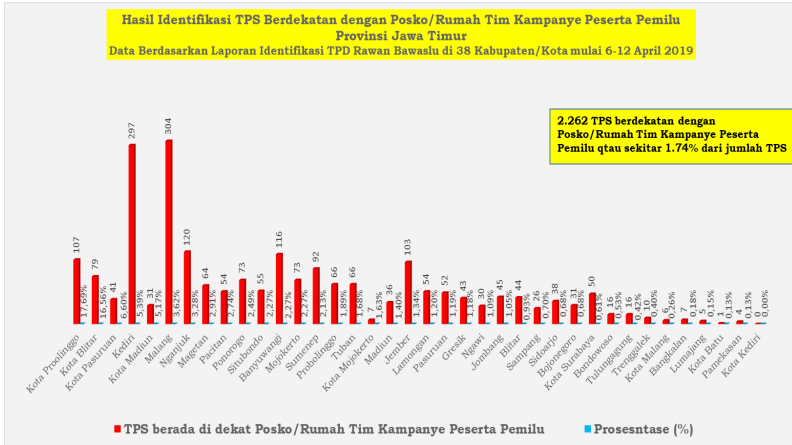
9. TPS Lokasinya Berdekatan dengan Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 2.262 TPS lokasinya berdekatan dengan Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu atau sekitar 1.74% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur. Hal ini tentu potensi mobilisasi Pemilih oleh tim kampanye atau sebutan lain Peserta Pemilu, sehingga mempengaruhi pilihan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pengawas Pemilu memastikan tim kampanye atau sebutan lain tidak melakukan kampanye, politik uang atau pemberian barang pada masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara menjalankan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Petugas KPPS, tokoh masyarakat, Pemantau Pemilu dan kepolisian untuk melakukan pengawasa bersama-sama, guna meminimalisir potensi kecurangannya.

Potensi kerawanan mobilisasi pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara dan melakukan kampanye baik berupa pemberian uang/barang pada masa tenang kampanye tanggal 14, 15 dan 16 April 2019.

Grafik 9 TPS Lokasinta berdekatan dengan Posko Pemenangan



Sumber Data: Hasil olah data Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslur Provinsi Jawa Timur

10. TPS Terdapat Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara Mengalami Kerusakan

Hasil identifikasi pada indikator ini sejumlah 165 TPS terdapat logistik/perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan atau sekitar 0.13% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur. H-1 sebelum pemungutan dan penghitungan suara, kekurangan logistik/Perlengkapan suara harus sudah diganti. Kekurangan ini akan berdampak pada kesiapan TPS misalnya pembukaan TPS dan seterusnya.

Pengawas Pemilu memastikan pada H-1 kekurangan logistik/Perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia di TPS. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Petugas KPPS dan Pengawas di Desa/Kelurahan setempat.

Potensi kerawanan hilangnya hak pilih seseorang diakibatkan

LAMPIRAN

NEWS MONEY BOLA TEKNO SAINS ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI TRAVEL EDUKASI KOLAM IMAGES

Identifikasi TPS Rawan, Bawaslu Jatim Temukan 691 TPS Jadi Tempat Praktik Politik Uang

Kompas.com - 16/04/2019, 13:23 WIB

BAGIKAN:   Komentar



Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi. (Dok. Aang Kunaifi)

Iklan ditutup oleh Google
 Berhenti menayangkan iklan ini
 Mengapa iklan ini? 

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur sudah mendapatkan hasil identifikasi mengenai tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Jawa Timur.

Identifikasi TPS rawan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur itu dilakukan selama enam hari pada 6-12 April 2019.

"Hasil identifikasi kami, 691 TPS pernah terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye. Presentasinya 0,53 persen dari jumlah TPS di Jawa Timur," ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi.

Menurut Aang, pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan, yang juga dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih.

Baca juga: [Kantor Bawaslu Padang Buka 24 Jam hingga H+3 Pencoblosan](#)

Bawaslu Jatim, kata Aang, sudah memetakan empat variabel dan sembilan indikator dalam mengidentifikasi TPS rawan.

"Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS," katanya saat dihubungi *Kompas.com*, Selasa (16/4/2019).

Sembilan indikator TPS rawan, antara lain, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dalam TPS, terdapat pemilih khusus (DPK) dalam TPS, TPS dekat rumah sakit, TPS dekat perguruan tinggi, dan TPS dekat lembaga pendidikan atau pesantren.

IDENTIFIKASI TPS RAWAN

Di Jawa Timur, lanjut Aang, sebanyak 11.985 TPS atau sekitar 9,22 persen, terdapat pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindah pilih dari 130.010 TPS di Jawa Timur.

Selain itu, di 4.464 TPS terdapat pemilih khusus (DPK) atau pemilih baru belum masuk DPT pascaputusan MK atau sekitar 3,43 persen dari jumlah TPS di Jawa Timur.

"Baca juga: [Bawaslu Gunungkidul Ronda Keliling Antisipasi Serangan Fajar](#)

Aang menegaskan, Bawaslu saat ini sedang melakukan patroli pengawasan agar praktik politik uang tidak terulang saat hari H pemungutan suara.

Sebab, serangan fajar tersebut bisa mempengaruhi pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Di sisi lain, pengawasan juga akan difokuskan di beberapa titik TPS rawan.

"Kita pilah mana TPS yang terkategori sebagai TPS yang rawan pelanggaran, baik karena tempatnya di posko (peserta pemilu) atau dari banyaknya DPK maupun DPTb dan sebagainya," jelasnya.

Ia memastikan fokus pengawasan akan dilakukan di TPS rawan yang sudah dilakukan identifikasi dan ditemukan variabel dan indikator mengenai TPS rawan tersebut.

Hasil identifikasi TPS rawan, kata dia, bisa menjadi acuan bagi kepolisian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemetaan kerawanan ini sebagai langkah pencegahan dan mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara," pungkasnya.

Bawaslu Jatim Minta Warga Viralkan Hasil Perhitungan Suara di TPS



Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang digelar KPU di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3).
Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Bawaslu Jawa Timur mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam mengawal Pemilu 2019. Masyarakat diminta tidak hanya menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga menunggu hingga hasil penghitungan selesai.

Setelah penghitungan selesai dituangkan dalam formulir C1, diharapkan didokumentasikan. Kemudian foto tersebut diviralkan lewat media sosial.

"Masyarakat kami harap tidak ikut serta di proses pungut saja. Tapi mengikuti proses hitung sampai selesai untuk kemudian menunggu hasil pleno yang kemudian digunakan untuk pengisian penghitungan suara yang kemudian didokumentasikan dan diviralkan," kata Komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi di kantornya, Selasa (16/4).

Imbauan Aang itu bukan tanpa sebab. Menurutnya, dengan publikasi hasil perhitungan suara di media sosial adalah langkah preventif atas praktik-praktik kecurangan perhitungan suara dalam pemilu.

"Kami dalam proses pengawasan pungut hingga rapat perhitungan suara dibantu sistem untuk kemudian tahu hasil di setiap pemungutan suara, perolehan suara masing-masing peserta Pemilu untuk kemudian agar tidak terjadi pergeseran (kecurangan)," ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jatim telah merilis potensi TPS di Jatim yang dianggap memiliki kerawanan. Salah satunya adalah TPS rawan yang berdekatan dengan Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu.

Hasil identifikasi pada indikator tersebut menunjukkan sebanyak 2.262 TPS lokasinya berdekatan dengan Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu atau sekitar 1.74% dari 130.010 jumlah TPS di Jawa Timur. Hal tersebut berpotensi kerawanan mobilisasi pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara serta melakukan kampanye baik berupa pemberian uang atau barang pada massa.

IDENTIFIKASI TPS RAWAN

detikNews / Berita-jawa-timur / Detail Berita

Follow detikcom



Jumat 22 Maret 2019, 13:53 WIB

Polisi Petakan 130.012 TPS di Jatim Dalam 3 Kategori, Apa Saja?

Hilda Melissa - detikNews



Kapolda Jatim usai apel getar pasukar/Foto: Hilda Melissa Riranda

Surabaya - 26.827 Personel gabungan dikerahkan dalam rangka Operasi Mantap Brata Semeru untuk pengamanan Pemilu 2019. Para personel gabungan dari Polri, TNI hingga Linmas ini akan menjaga 130.012 TPS.

Apel kesiapan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Usai apel, para Forkopimda yang hadir seperti Gubernur Khofifah hingga Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI R. Wisnoe Setya Budi juga menandatangani deklarasi untuk mensukseskan pemilu damai.

"Saya berharap kepada TNI-Polri dan instansi yang terlibat dalam pengamanan pemilu tahun 2019 agar terus meningkatkan sinergitas dan dapat bekerja dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar," kata Luki di Lapangan Makodam V Brawijaya, Jumat (22/3/2019).

Sementara itu, untuk personel pengamanannya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera merinci dari 24.327 personel dari 39 Polres se-Jatim. Selain itu, ada 2.500 personel dari Polda Jatim.

Selain itu, jumlah ini akan dibantu dari anggota Linmas yakni sebanyak 158.080 personel dan dari TNI sebanyak 13.513. Para personel ini akan ditempatkan di beberapa titik di Jatim.

"Personel paling banyak akan ditempatkan saat pengamanan di setiap titik Tempat Pemungutan Suara (TPS)," jelasnya.

Tak hanya itu, Barung mengatakan di Jatim ada 130.012 TPS. Dalam operasi Mantap Brata ini akan dipetakan tiga kategori TPS mulai dari kurang rawan, rawan dan sangat rawan.

Barung menambahkan kategori TPS rawan ditinjau dari berbagai aspek misalnya dari kondisi geografis. Dia mencontohkan di daerah perbatasan provinsi di ujung Jawa Timur, Banyuwangi yang berbatasan dengan Pulau Bali.

"Dikatakan rawan karena situasi geografisnya dan rawan karena history pernah terjadi hal-hal di wilayah tersebut," papar Barung.

Selain itu, pengamanan satu TPS akan diamankan oleh dua personel gabungan. Setiap TPS rawan akan diawasi oleh satu pengaman. Apabila tidak rawan, dari empat TPS hingga enam TPS akan diawasi oleh dua personel.

Ditemui di kesempatan yang sama Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI R Wisnoe mengatakan pihaknya akan aktif untuk turut mengamankan pesta demokrasi. Selain itu, selama ini pihaknya juga telah melakukan latihan fisik.

"Kita melaksanakan latihan-latihan sampai dengan puncaknya latihan sispamkota kemarin dengan Kepolisian," pungkasnya.

Kamis 18 April 2019, 14:19 WIB

9 TPS di Jatim Berpotensi Dilakukan Coblosan Ulang

Hilda Melisa Rinanda - detikNews



Surabaya - Bawaslu Jawa Timur menyebut ada tujuh TPS di wilayah Jatim yang berpotensi untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**. Hal itu berdasarkan dugaan beberapa pelanggaran yang ditemukan.

"Kami dari Bawaslu Jatim memang menemukan beberapa dugaan pelanggaran di wilayah Jawa Timur, tapi demikian dari beberapa adegan tersebut tampaknya ada sekitar 7 sampai 9 TPS yang akan direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang," kata Anggota Bawaslu Jatim Purnomo Satriyo Pringgodigdo di Surabaya, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Gus Ipul Minta Capres Tahan Diri dan Hormati Keputusan Rakyat

Saat ditanya TPS tersebut di daerah mana saja, Purnomo menyebut TPS terbanyak yang berpotensi PSU ada di wilayah Madura. Selain itu, ada pula TPS yang berada di Surabaya, Mojokerto dan Gresik.

"Yang pasti di daerah Madura ada Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Surabaya, Mojokerto, dan Gresik," imbuhnya.

Namun Purnomo mengatakan tujuh hingga sembilan daerah tersebut masih disebut berpotensi. Dia menambahkan untuk keputusan PSU atau tidak, merupakan ranah KPU. Selain itu, pihaknya masih mendalami beberapa temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu ini.

Baca juga: Kericuhan Pemilu di Sampang, Penembakan Hingga Bawa Kabur Kotak Suara

"Yang pasti kami sedang mendalami, melakukan kajian bila mana memang dibutuhkan akan direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang. Tapi keputusan **PSU** itu ada di KPU Kabupaten," lanjutnya.

Saat ditanya pelanggaran apa saja yang membuat TPS-TPS tersebut rawan PSU, Purnomo menambahkan ada beberapa hal. "Untuk permasalahannya ada macam-macam misalnya memang DPR tersebut ternyata didatangi oleh sekelompok orang yang diduga menggunakan paksaan untuk memilih atau misalnya ada dugaan surat suara yang memang sudah tercoblos dari awalnya."

IDENTIFIKASI TPS RAWAN

tribunMadura.com Rabu, 2 Oktober 2019 Cari Net

Home Madura News Madura United Superskor Tapal Kuda

Rumah Politik Jatim

Pemilu 2019, Bawaslu Jatim Terjunkan 130 Ribu Pengawas TPS untuk Awasi Potensi Money Politic

Selasa, 9 April 2019 09:22



2019

PEMILIHAN UMUM

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Bawaslu Jatim menerjunkan ratusan ribu pengawas jelang hari H pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Para petugas tersebut secara khusus akan pada tindakan preventif terhadap politik uang jelang Pemilu.

"Sampai sekarang memang belum ada yang telah terbukti di dalam tindakan politik uang. Namun, yang perlu menjadi catatan, potensi politik uang itu ada," kata Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Hariyono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (8/4/2019).

Totok Hariyono mengatakan, tengah memetakan wilayah berdasarkan potensi yang rawan terhadap politik uang tersebut.

"TPS rawan itu yang rawan politik uang. Bagaimana peluang politik uang ada di TPS itu," jelasnya.

Menurut Totok Hariyono, ada beberapa indikator politik uang terjadi di masyarakat, misalnya dari sosial masyarakat, kecenderungan, dan beberapa aspek lain.

Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya memiliki program patroli yang akan dilaksanakan sejak masa tenang pemilu hingga pemungutan suara.

Tidak tanggung-tanggung, pengawas yang diturunkan mencapai sekitar 130 ribu pengawas atau setara dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jatim.

"Kami patroli pengawasan sampai Hari H. Semua petugas akan turun dan berkeliling ke pelosok daerah," katanya.

Diharapkan, dengan keberadaan para pengawas, para pelaku yang akan melakukan politik uang dapat berpikir ulang.

"Minimal ada aspek psikologis dengan turunnya para pengawas ini," katanya.

"Akhirnya orang yang akan menyebar uang, akan berpikir ulang. Ini menjadi sirine. Sekalipun ada uang, tidak akan dibagikan," tegasnya.(bob)

Bawaslu Petakan Daerah Rawan, Magetan Peringkat Pertama

Ada 9 indikator daerah rawannya



★ Verified
Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah merilis daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di Jatim. Untuk pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (17/4), Bawaslu akan memberikan perhatian khusus kepada beberapa daerah yang memiliki daftar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tinggi.

1. Bawaslu petakan daerah rawan di Jatim



IDENTIFIKASI TPS RAWAN

Dalam merumuskan daerah rawan tersebut, Bawaslu Jatim menggunakan 4 variabel untuk 9 indikator. 9 indikator tersebut adalah terdapat pemilih DPTb dalam TPS, terdapat pemilih DPK dalam TPS, TPS dekat rumah sakit, TPS dekat perguruan tinggi, TPS dekat lembaga pendidikan, terdapat praktik pemberian uang, terdapat praktik menghina atau menghasut, petugad KPPS berkampanye, atau TPS yang berada dekat posko tim kampanye.

"Kita menyusun, memetakan beberapa TPS yang terkategori rawan dengan menggunakan 4 variabel dan 9 indikator. Sehingga memasuki masa tenang ini kami punya data acuan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi penceahan pengawas pemilu," jelas Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi saat ditemui di kantornya, Selasa (16/4).

2. Variabel yang paling diperhatikan adalah kampanye



Aang mengatakan bahwa dari keempat variabel yang menjadi acuannya, hal yang paling diperhatikan adalah permasalahan kampanye yaitu apabila terdapat praktik pemberian uang atau praktik penghasutan dan penghinaan.

"Karena yang paling mungkin muncul dan paling berpotensi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap proses demokrasi ini ya praktik itu. Yang kedua itu baru isu SARA yang kemudian viral di media," lanjutnya.

3. Tiga daerah rawan politik uang



Berdasarkan hasil pencermatan, daerah dengan tingkat kerawanan tinggi atas operasi serangan fajar diraih oleh Kabupaten Magetan dengan 152 TPS rawan, Kabupaten Banyuwangi dengan 107 TPS rawan, dan Kota Probolinggo dengan 77 TPS rawan.

"Mungkin banyak aspek kalau kemudian daerah-daerah itu berpotensi tinggi terjadinya praktek politik uang misalnya masyarakatnya terbiasa dengan praktek pemilihan desa. Banyak lah variabelnya," terang Aang.

4. Magetan menempati daerah rawan tertinggi di beberapa indikator



Dari keseluruhan indikator, Kabupaten Magetan menempati posisi tertinggi yaitu TPS rawan politik uang, TPS dengan KPPSnya yang berkampanye, dan TPS terdapat logistik yang mengalami kerusakan. Aang mengatakan bahwa Kabupaten Magetan memang cukup bermasalah berdasarkan Pemilu sebelumnya.

"Pemetaan itu didasarkan dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu nasional 2014, Pileg maupun Pilpres, kemudian pemilihan kepala daerah yang terakhir," pungkasnya.

IDENTIFIKASI

Tempat Pemungutan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang berdampak pada hilangnya hak Pilih, mempengaruhi pilihan Pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini Pengawas Pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Pengawas Pemilu dapat melibatkan semua stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan.

Buku ini memotret pencegahan melalui identifikasi TPS rawan, yang dilakukan Peserta Pemilu di Provinsi Jawa Timur.

ISBN 978-623-90290-5-0

